

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga pemerintah merupakan lembaga yang dimana memiliki wewenang dalam mengelola kebutuhan bangsa dan negara. Secara umum, lembaga pemerintah terbentuk untuk menyajikan layanan kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang tidak berorientasi pada keuntungan, prioritas utama dari pemerintah adalah bukan mengumpulkan profit, tetapi menyediakan layanan terbaik dan berusaha untuk terus memperbaiki kualitas layanan di masa mendatang (Lisnasari., et al, 2022).

Salah satu unsur pendukung tercapainya suatu tujuan dalam lembaga pemerintah adalah anggaran. Anggaran digunakan lembaga untuk memfasilitasi segala kegiatan yang berorientasi pada keberhasilan program kerja. Anggaran merupakan dokumen yang merinci langkah-langkah kerja pada suatu instansi, yang dirancang melalui proses yang detail, serta telah dinyatakan dalam bentuk angka moneter atau taksiran untuk pencapaian program pada taun yang akan datang anggaran berfungsi sebagai instrumen akuntansi yang membantu para pemimpin dalam menyusun rencana dan mengontrol kegiatan atau operasi lembaga pemerintah. Selain itu, anggaran juga berperan dalam mengarahkan aktivitas dan dapat difungsikan sebagai alat untuk membandingkan dan menilai hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga dari evaluasi tersebut, proses pelaksanaan dapat terjadi dan terkontrol (Dwifarchan., et al, 2023).

Anggaran biasanya dikenal sebagai suatu rencana finansial, sehingga dituangkan dalam ukuran moneter. Setiap perusahaan atau lembaga diharuskan untuk membuat dan mengelola anggaran, disebabkan karena anggaran memiliki peran krusial dalam mengawasi pesatnya perkembangan ekonomi internal suatu instansi. Selain itu, anggaran

juga berperan sangat penting karena menjadi panduan finansial untuk waktu yang telah disepakati yang mencakup harapan manajemen sehubungan dengan pendapatan, pengeluaran, serta adanya transaksi keuangan lainnya selama satu tahun. Tahap perencanaan anggaran yaitu fase yang sangat krusial karena anggaran yang dinilai kurang efektif dan tidak didukung oleh kinerja dapat merusak program-program yang telah direncanakan sebelumnya (Dwifarchan., et al, 2023).

Pengelolaan anggaran dibutuhkan dalam mengalokasikan anggaran lembaga pemerintah. Pengelolaan anggaran memiliki peranan yang penting bagi instansi atau lembaga pemerintah karena berguna dalam merencanakan alokasi anggaran serta mengevaluasi anggaran yang telah digunakan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo yang sebagian dari lembaga pemerintah yang pasti menerapkan pengelolaan anggaran yang dilakukan setiap tahunnya. Pengelolaan anggaran tersebut tentunya memiliki beberapa indikator yang dapat mengukur seberapa efektif antara perencanaan dan pengalokasian anggaran. Indikator pengelolaan anggaran terdapat dalam dokumen Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023, terdapat beberapa indikator penting untuk menilai kinerja anggaran kementerian dan lembaga. Indikator tersebut meliputi: perencanaan anggaran yang terstruktur dan sistematis, pelaksanaan anggaran yang sudah efektif dan efisien, dengan pelaporan keuangan yang sangat akurat, transparan yang sesuai standar akuntansi pemerintah. Dalam pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023, disebutkan prinsip belanja berkualitas yaitu efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas dibutuhkan pengukuran yang disebut efektivitas dan efisiensi.

Efektivitas adalah aspek penting yang penting untuk diterapkan dalam suatu tugas sehingga harapan yang sudah ditentukan dapat dilaksanakan dengan benar. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai elemen utama dalam mencapai tujuan dan target yang sudah disahkan oleh suatu instansi atau lembaga. Sebuah instansi dianggap efektif jika mampu meraih tujuan serta sasaran yang telah direncanakan sebelumnya, ini menunjukkan yang mana efektivitas selalu berfokus pada kemampuan instansi untuk sukses beradaptasi dengan lingkungan, yang menjadi ciri khas dari organisasi yang efektif (Dwifarchan., et al, 2023). Perhitungan rasio efektivitas adalah dengan membagi realisasi penerimaan anggaran dengan target penerimaan anggaran (Hajar Ibnu., et al, 2023). Hasil rasio efektivitas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kriteria menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 yaitu *sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif*.

Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo mengelola anggaran yang signifikan untuk program-program strategis yang selaras dengan prioritas nasional dan daerah, seperti pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas keluarga, penurunan stunting, dan pencegahan pernikahan dini. Karena program tersebut langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target pembangunan daerah, penelitian pada instansi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat Ponorogo.

Secara umum, efisiensi bisa dipahami sebagai ketiadaan pemborosan. Setiap langkah yang akan diambil untuk meraih sebuah sasaran yang telah ditetapkan memerlukan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan agar tujuan yang diharapkan dapat

tercapai dengan akurat dan benar (Dwifarchan., et al, 2023). Menurut (Susanto, 2019) efisiensi merupakan ukuran yang membandingkan seberapa baik suatu organisasi, seperti pemerintah daerah atau perusahaan, dalam menggunakan sumber daya mereka untuk menghasilkan hasil atau mewujudkan output yang diinginkan. Perhitungan rasio efisiensi dengan membagi realisasi belanja dengan realisasi penerimaan anggaran (Hajar Ibnu., et al, 2023). Hasil rasio efisiensi tersebut akan dibagi menjadi beberapa kriteria Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 yaitu *tidak efisien, kurang efisien, cukup efisien, efisien, dan sangat efisien*.

Berdasarkan hasil observasi tanggal 17 Juni 2025 dengan penanggung jawab bidang pengelolaan anggaran dan perencanaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, ibu Farida menjelaskan faktor-faktor yang mendukung efektivitas pengelolaan anggaran yaitu tujuan yang jelas dan terukur, perencanaan yang terorganisir, komunikasi yang efektif, sumber daya yang cukup. Sedangkan faktor-faktor pendukung efisiensi pengelolaan anggaran adalah penerapan sistem informasi terbaru, kerjasama antar devisi yang baik, prosedur yang terstruktur. Instansi dapat terus berinovasi, dengan mendukung peningkatan efisiensi operasional dan pencapaian target yang telah ditentukan. Analisis ini mendukung tujuan Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo dalam mencapai pengembangan yang berkelanjutan dengan memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas program keluarga berencana dan pengendalian jumlah penduduk.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif dan efisien pengelolaan anggaran, dengan mempergunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis ini dimana dapat digunakan untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pengelolaan

anggaran yang krusial, analisis tersebut bermanfaat dalam penggunaan sumber daya yang optimal, meningkatkan kualitas layanan, dan membantu para pembuat keputusan dalam merencanakan distribusi anggaran di masa mendatang. Selain itu, analisis tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti kesejahteraan masyarakat (Medindari., et al, 2024).

Penelitian ini menunjukkan bahwa data dari laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2024, dan anggaran pendapatan. Berdasarkan dari penjelasan terkait masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan pada Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi referensi manajemen dalam membuat keputusan untuk perencanaan pengelolaan anggaran pada masa mendatang. Pada masalah yang telah dibahas, judul penelitian ini adalah ***“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo Tahun 2024”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah seperti berikut:

- 1) Bagaimana analisis dan evaluasi efektivitas pengelolaan anggaran pada DPPKB 2024?
- 2) Bagaimana analisis dan evaluasi efisiensi pengelolaan anggaran pada DPPKB 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang dipaparkan di latar belakang, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) 2024.
- 2) Menganalisis dan mengevaluasi efisiensi pengelolaan anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini :

- 1) Bagi Universitas

Manfaat penelitian bagi universitas pengembangan kurikulum yang lebih relevan.

Hasil penelitian dapat memberikan wawasan dan data terkini yang membantu universitas merancang dan memperbarui materi terbuka, sehingga program studi yang ditawarkan sejalan dengan perkembangan terkini pada bidangnya.

- 2) Bagi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Penelitian bisa dijadikan sebagai evaluasi dalam menilai kinerja pengelolaan anggaran yang telah dilakukan, sehingga dapat digunakan untuk mengenali berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada. Penelitian ini mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang jelas dan terukur, guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan anggaran di DPPKB. Hasil temuan penelitian ini boleh digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran pada waktu yang akan datang. Penelitian ini bisa berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di DPPKB, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja dinas.

3). Bagi Umum

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang penting terkait manajemen anggaran di sektor publik, terutama di Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini boleh digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan isu-isu pengelolaan anggaran, serta efektivitas dan efisiensi.

